

	News Title : Indonesia Segera Luncurkan Ekspor CPO Melalui Bursa Berjangka	
	Media Name : niaga.asia	Journalist : Intoniswan
	Publish Date : 06 June 2023	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Zulkifli Hasan (Menteri Perdagangan), Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Parlementaria	Topic : Bursa CPO

Indonesia Segera Luncurkan Ekspor CPO Melalui Bursa Berjangka

06 Juni 2023

English



Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

JAKARTA, NIAGA.ASIA – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, Kementerian Perdagangan baru belakangan menjangkau kinerja ekspor minyak kelapa sawit melalui Bursa Berjangka CPO/CPA yang mendorong pembentukan harga acuan CPO yang transparan, akurat, stabil dan tepat waktu baik untuk perusahaan besar, menengah maupun petani kelapa sawit.

Ujraya diucapkan Kementerian Perdagangan dengan menginisiasi kebijakan ekspor CPO melalui Bursa Berjangka ini di dukungan Mendag Zulkifli Hasan dalam acara Konsultasi Publik Rancangan Kebijakan Ekspor CPO Melalui Bursa Berjangka di Indonesia pada Senin, (5/6) di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta.

Acara ini dihadiri perwakilan kepentingan sektor kelapa sawit dan penasehat Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapsi) Mendang Mendag Zulkifli Hasan yaitu Sekretaris Jenderal Suharto, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Iy Kurni, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Budi Saritoko, serta Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kasih.

Selain itu, hadir tim inti pejabat eselon II sekretaris Bappebti Olyv Andriana, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) Tita Karma Satriya, Kepala Biro Pengawasan PBK Sotero Rendi Gungad (SRG) dan Pinar Lubang, Komisioner DMO Hidayat, Direktur Ekspor Produk Pertanian Dan Kehutanan Dijen Daglu Fariq Amir, serta Kepala Pisak Kebijakan Ekspor, Inpor dan Penguasaan Perdagangan Iskandar Parjanto.

"Ekspor CPO melalui bursa berjangka yang diragukan diluncurkan pada Juni 2023 ini diharapkan dapat menjadi pembuka langkah ekspor CPO. Keberhasilan ekspor CPO melalui bursa berjangka akan memper mudah pengusaha, meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta pada akhirnya meningkatkan perdagangan Indonesia," kata Mendag Zulkifli Hasan.

Mendag Zulkifli Hasan mengungkapkan, saat ini ekspor masih surplus meskipun tidak terlalu besar karena kondisi permintaan global yang sedang melemah. Untuk itu, perlu inovasi sistem seperti pengalihan perdagangan dari pasar tradisional ke nontradisional seperti Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika.

Hal ini diperlukan karena mulai banyak aturan-aturan yang mempersulit ekspor seperti adanya kebijakan sertifikasi di Eropa dan Amerika.

"Selain pengalihan pasar dari tradisional ke nontradisional perlu juga memperkuat kebijakan ekspor Indonesia. Salah satunya melalui kebijakan ekspor CPO karena CPO merupakan salah satu penyumbang surplus negara perdagangan," lanjut Mendag Zulkifli Hasan.



Mendag Zulkifli Hasan dan tim inti pejabat eselon II sekretaris Bappebti dalam acara konsultasi publik Rancangan Kebijakan Ekspor CPO Melalui Bursa Berjangka di Indonesia pada Senin, (5/6) di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta.

Menurut Mendag Zulkifli Hasan, sebagai negara penghasil CPO terbesar di dunia, sudah waktunya Indonesia memiliki harga acuan untuk CPO sendiri. Namun kondisi yang ada sekarang menunjukkan bahwa Indonesia belum berperan dalam memberikan harga acuan yang diakui di pasar dunia.

Harga acuan untuk komoditas CPO saat ini masih mengacu ke Pasar Fisk Rotterdam dan Pasar Berjangka di Kuala Lumpur (MDEX) sebagai basis penetapan harga CPO dunia.

Berkaitan dengan kebijakan tersebut diuraikan berbagai masukan agar ekspor CPO melalui bursa tidak mengahnsi ekspor CPO. Poin-poin yang akan selaras tidak banyak berubah kecuali kewajiban ekspor CPO melalui bursa berjangka. Kebijakan kewajiban penemuan DMO (Domestic Market Obligation) masih berlaku, sehingga ekspor tetap wajib melalui HE terlebih dahulu.

Diharapkan pelaku usaha dapat mendukung keberadaan pengalihan ekspor CPO melalui bursa berjangka ini," tandas Mendag Zulkifli Hasan.

Hanya untuk CPO

Sementara itu, Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengungkapkan, ekspor melalui bursa berjangka komoditas ini hanya akan mengacu DMO dengan HS 1511000 dan tidak termasuk produk turunan. Pihak-pihak yang berhak melakukan ekspor wajib memiliki Hak Ekspor (HE).



Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko.

Ini dipertah dari pemenuhan atas kebijakan DMO dan atau memiliki HE yang dipertah dari pihak yang mengahnsi HE atau pemenuhan DMO. Untuk CPO akan membuat harga pasar yang wajar dan dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak, mulai dari petani, pedagang, pengusaha, bahkan negara dari sisi penerimaan pajak.

"Kita ingin memastikan untuk ekspor CPO melalui bursa berjangka. Secara umum, Bappebti telah mengkoordinasikan kebijakan ekspor CPO melalui bursa berjangka dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Badan Kebijakan Perdagangan. Selain itu, Komendag telah mengorganisir konsultasi publik berupa Focus Group Discussion (FGD) dengan Kementerian/Lembaga serta berbagai asosiasi dan pelaku usaha terkait," lanjut Didid.

Didid melanjutkan, dalam prosesnya nantinya, akan ada tiga tahap kebijakan yakni Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ekspor CPO melalui Bursa Berjangka di Indonesia, peraturan Bappebti yang akan mengatur seluruh aspek teknis atau lain-lain berkaitan mekanisme perdagangan, mekanisme pengawasan, dan mekanisme penyelesaian perselisihan, serta Peraturan Tata Tertib (PTT) ekspor CPO melalui Bursa Berjangka.

"Diharapkan masukan pelaku usaha sektor sawit agar kebijakan tersebut dapat terlaksana, terutama pada masa transisi. Kemendag akan memastikan ekspor CPO melalui bursa dapat berjalan secara efektif," imbuh Didid. Nantinya, masa transisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ekspor CPO melalui Bursa Berjangka akan diarahkan ke arah untuk memberikan ruang bagi pelaku usaha agar menyesuaikan dengan kebijakan yang baru dan proses sosialisasi kebijakan, serta integrasi sistem di Kementerian Perdagangan, Indonesia National Single Window (INSW), dan Bursa CPO.

"Masa transisi ini diharapkan dapat meminimalisir permasalahan yang mungkin terjadi dalam perdagangan ekspor CPO di Indonesia serta memperlancar implementasi kebijakan," lanjut Didid.